

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan organisasi yang begitu pesat tidak hanya dirasakan oleh organisasi yang berorientasi pada profit. Perkembangan juga dirasakan oleh organisasi nirlaba atau organisasi yang bergerak tanpa mengedepankan tujuan profit di dalamnya. Adanya perkembangan ini terjadi karena organisasi nirlaba ikut berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan dana serta sumber daya yang besar. Organisasi nirlaba yang ada dalam masyarakat meliputi organisasi keagamaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, sekolah, organisasi sukarelawan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kedua organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi nirlaba, memiliki kesamaan. Pertama, kedua organisasi sama-sama menyediakan jasa (atau produk) dan bersaing dengan organisasi lain untuk menjadi organisasi yang dapat dipilih dan diterima oleh masyarakat. Kedua, baik organisasi profit maupun nirlaba harus memiliki manajemen yang profesional agar organisasi tersebut mampu untuk mengembangkan tujuan serta strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain adanya kesamaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang muncul diantara dua jenis organisasi tersebut, yaitu bagaimana cara kedua organisasi memperoleh sumber daya (pendapatan) yang dibutuhkan organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Menurut PSAK No.45, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang ada dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (SAK 2017). Pada dasarnya, organisasi nirlaba diminta untuk selalu menyiapkan rencana beserta program dan juga anggarannya secara berkelanjutan. Rencana dan program serta anggaran inilah harus memenuhi sebuah standar tata kelola yang baik (*good governance*) yang berfungsi untuk mengelola urusan ataupun masalah publik yang ada.

United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa terdapat sembilan karakteristik dari penerapan konsep *good governance*, salah satu diantaranya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas untuk setiap organisasi swasta maupun organisasi publik non pemerintah adalah hal yang sangat dibutuhkan. Setiap organisasi mempunyai keterkaitan antara pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas menjadi tanggung jawab individu maupun kelompok kepada para *stakeholder*. Desakan dari para *stakeholder* akan pentingnya pelaksanaan dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas di dalam setiap manajemen organisasi merupakan kewajiban yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh para *stakeholder*. Akuntabilitas diperlukan agar para *stakeholder* dapat mengerti kondisi serta kinerja dari suatu organisasi. Para *stakeholder* dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja organisasi melalui penyajian informasi yang transparan dan juga sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen. Pertanggungjawaban kinerja organisasi nirlaba harus sesuai dengan prinsip supaya para pemberi sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya yang sudah diberikan dikelola dengan sebagaimana mestinya.

Pentingnya penerapan akuntabilitas bagi setiap organisasi di Indonesia dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono di tahun 2015 mengenai akuntabilitas organisasi sektor publik. Dalam penelitian tersebut mengkritisi pentingnya penerapan akuntabilitas bagi setiap organisasi, terutama organisasi di negara demokratis seperti Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat keterbukaan informasi dan tuntutan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi merupakan hal yang harus diutamakan, termasuk terbukanya akses terhadap laporan kegiatan organisasi. Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas meliputi pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaporan pengelolaan transaksi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak di luar perusahaan atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Pelaporan keuangan ini perlu dilakukan untuk menilai seberapa besar tanggung jawab bendahara dalam menciptakan informasi keuangan. Transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan adanya laporan pertanggungjawaban keuangan (Muslim dan Puryanto, 2006).

Sasaran yang dituju adalah laporan keuangan yang mencakup adanya penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan sebuah instansi (LAN dan BPKP, 2001). Berdasarkan fakta tersebut, maka laporan keuangan merupakan hal utama yang wajib diperhatikan dalam penerapan akuntabilitas sebuah lembaga atau organisasi. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh sebuah organisasi. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait posisi keuangan, kinerja perusahaan, hingga perubahan posisi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit. Hal ini disebabkan bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait keberlangsungan organisasi oleh pihak manajemen. Selain itu, dari laporan keuangan dapat diketahui segala macam informasi mengenai keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu, mengetahui kondisi perusahaan saat itu apakah perusahaan dalam keadaan sehat, mengalami krisis atau sudah dinyatakan bangkrut serta dapat mengetahui seberapa lama perusahaan dapat bertahan.

Pentingnya laporan keuangan bagi setiap organisasi menyebabkan laporan keuangan harus dibuat dan diawasi dengan adanya sebuah sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik berfungsi sebagai *quality assurance* yang menjamin suatu proses kegiatan berjalan dengan baik, sesuai aturan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan, dan memastikan sistem pengendalian internal telah dijalankan dan menilai laporan yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Laporan keuangan yang dibuat tanpa memperhatikan standar pelaporan keuangan dapat menyebabkan informasi yang dilaporkan menjadi salah dan tidak tepat bagi penggunanya. Salah satu cara untuk melakukan kontrol terhadap pelaporan keuangan adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai *good governance*, salah satunya adalah akuntabilitas.

Pengimplementasian akuntabilitas pelaporan keuangan juga diterapkan dalam Gereja Kristen Jawa Nehemia yang merupakan salah satu organisasi nirlaba keagamaan khususnya organisasi rumah ibadah, gereja bagi umat Kristen di Jakarta Selatan. Pendanaan gereja ini salah satunya bersumber dari persembahan warga jemaat yang tidak diatur secara khusus, namun dalam “Tata Laksana GKJ” pasal 13 tentang Kekayaan Gereja tertulis: Kekayaan Gereja diperoleh dari persembahan warga gereja sebagai salah satu bentuk ungkapan sukarela dan tidak mengikat yang berupa uang dan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Persembahan berupa uang terdiri dari persembahan mingguan, bulanan/persepuluhan, pembangunan dan persembahan istimewa yang meliputi baptis, pernikahan, hari raya Kristen, unduh-unduh, ucapan syukur berkaitan dengan peristiwa khusus, dan lainnya. Disamping itu juga ada sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alkitabiah.

Sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba, GKJ Nehemia mendapatkan sumber pendanaannya dari tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan rutin (mingguan), penerimaan bulanan, dan penerimaan khusus (misalnya dalam acara-acara tertentu seperti Perjamuan Kudus). Seluruh penerimaan tersebut diperoleh secara sukarela yang diberikan dari jemaat gereja, donatur, maupun pihak lain yang ingin berkontribusi bagi pembangunan dan kegiatan operasional gereja. Gereja yang telah diresmikan sejak 29 November 1985 ini telah mampu menjalankan kegiatannya secara mandiri, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Di dalam gereja, pengelolaan keuangan diatur oleh majelis sebagai pemegang tanggung jawab.

Peneliti melihat fenomena terkait akuntabilitas pelaporan keuangan organisasi nirlaba masih ada yang belum terwujud, salah satu fenomena terdapat pada jurnal Eko Kumara (2015). Jurnal ini meneliti 83 LSM di Indonesia untuk melihat pengelolaan keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 45 atau belum. Ternyata didapatkan temuan, baru 44% organisasi nirlaba yang menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45. LSM masih terfokus pada laporan pertanggungjawaban keuangan kepada para penyumbang, dan belum sepenuhnya mengembangkan sistem pelaporan keuangan organisasi yang terkonsolidasi (Eko

Kumara, 2015). Fenomena lain terkait akuntabilitas pelaporan keuangan organisasi nirlaba khususnya gereja, juga terdapat pada jurnal Fransiskus Randa (2015). Randa melakukan penelitian mengenai analisis dimensi akuntabilitas pada organisasi nirlaba gereja dengan studi kasus Gereja Katolik Kevikepan Makassar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa para jemaat masih menilai bahwa organisasi gereja belum secara maksimal menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kegiatannya. Hal ini dilihat dari hasil survei terhadap jemaat gereja yang menunjukkan bahwa angka kepuasan jemaat terhadap akuntabilitas keuangan gereja masih berada di bawah 50%.

Selain itu, Fransiskus Randa (2011) melakukan penelitian terhadap akuntabilitas gereja dengan mencoba memahami Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Organisasi Gereja Katolik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian etnografi, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengungkapkan kehidupan sosial masa kini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi partisipasi dan wawancara terbuka dengan narasumber. Penelitian ini menemukan tiga konsep dalam akuntabilitas Gereja yang meliputi akuntabilitas spiritual, akuntabilitas kepemimpinan, dan akuntabilitas keuangan. Pada tingkat stasi ditemukan dua jenis dana yang dikelola, yaitu dana stasi dan dana pembangunan sedangkan pada tingkat Paroki, dana yang dikelola antara lain dana kolekte (persembahan mingguan), dana gembala, dan dana pembangunan. Dari dua jenis dana tersebut ditemukan adanya perbedaan dalam praktik akuntabilitas tata kelola harta benda gerejawi. Pengelolaan dana stasi dan dana pembangunan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan adanya laporan pertanggung jawaban kepada umat secara transparan dengan mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran setiap hari Minggu, sedangkan pengelolaan di tingkat paroki, praktik akuntabilitas masih belum dapat terlaksana dikarenakan adanya aturan gereja yang menempatkan pimpinan gereja sebagai sosok sentral dalam mengelola segala urusan gereja.

Hasil pra-riset yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan fakta dan temuan bahwa dalam pengelolaan keuangan, majelis telah mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan

Wakil Ketua Bidang 3 Penatalayanan (Bapak Setyo Tuhu), Pendeta (Bapak Agus Hendratmo), dan Ketua Majelis (Bapak Suradji).

Menurut Bapak Setyo Tuhu (Wakil Ketua Bidang 3 Penatalayanan yang mempunyai fokus di laporan keuangan dan karyawan gereja), majelis selaku pemegang tanggung jawab dari jemaat telah berupaya untuk mengelola pemasukkan dan pengeluaran dengan baik. Setiap pengeluaran dan pemasukkan selalu dicatat secara berkala dan dilaporkan ke pihak gereja dan jemaat. Pelaporan keuangan rutin dilakukan setiap minggu melalui warta jemaat dan juga setiap tahun melalui laporan tahunan.

Jadi laporan saya selama ini *on-time*. Dan itu bisa dibaca, bisa dinikmati oleh majelis maupun jemaat. Pun secara detil, itu biasanya di laporan tahunan. Jadi kalau mingguan itu di warta jemaat, informasinya target penerimaan sekian, target pengeluaran sekian, dan laporan tambahannya berupa “penerimaan sampai dengan minggu tanggal sekian adalah sekian”. (Manuskrip: IK.1 Wawancara 25 September, 2018).

Menurut pendeta gereja, Bapak Agus Hendratmo, pengelolaan keuangan gereja juga telah dilakukan dengan baik. Majelis secara bertanggung jawab telah melaporkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara detail.

Sebenarnya hampir semua dilaporkan. Penerimaannya, pengeluaran, bahkan secara detail itu dilaporkan per minggu juga per tahun. Sangat lengkap. (Manuskrip: IK.2 Wawancara 30 September, 2018).

Menurut ketua majelis, Bapak Suradji, tuntutan akuntabilitas tidak hanya untuk organisasi profit namun juga organisasi non profit. Terkadang banyak yang menganggap lebih mudah melakukan penyimpangan pada organisasi nirlaba, namun kenyataannya jika dalam organisasi nirlaba (gereja) ada pendekatan keagamaan yang bertujuan sebagai layanan non profit kepada jemaat. Pada pengelolaan keuangan gereja secara administratif sudah memadai dan sesuai, sehingga menurut majelis pelaporan keuangan gereja sudah lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, namun masih perlu ditanyakan juga dari sudut pandang jemaat.

Sebenarnya laporan-laporan keuangan itu ada semua. Artinya setiap komisi menyampaikan. Ada, semuanya ada, karena kalau tidak ada ngga mungkin. (Manuskrip: IK.3 Wawancara 01 Oktober, 2018).

Namun, ada jemaat yang belum mengetahui tentang pelaporan keuangan gereja yang telah dikelola tersebut, dikarenakan beberapa alasan seperti jemaat

yang kurang peduli terhadap masalah keuangan gereja atau sebaliknya sangat percaya terhadap majelis yang mengelola keuangan yang telah mereka berikan.

Tetapi selama ini memang tidak pernah ada yang mengkritisi atau mempertanyakan. Satu, apakah cuek. Kedua apakah takut atau percaya banget. Bisa cuek atau percaya banget, atau ya terserah aja itu mau buat apa. (Manuskrip: IK.3 Wawancara 01 Oktober, 2018).

Sebagai salah satu gereja yang mengalami pertumbuhan pesat serta masalah keuangan yang dinamis, GKJ Nehemia dituntut untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam setiap kegiatan operasionalnya, termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan konsep dan salah satu prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada organisasi nirlaba, dalam hal ini organisasi keagamaan (gereja). Penelitian ini ingin membahas bagaimana akuntabilitas dari Gereja Kristen Jawa Nehemia dalam hal mengelola keuangan dari jemaat maupun dari sumber lainnya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN GKJ NEHEMIA JAKARTA”** untuk dapat lebih mengetahui sejauh mana pengimplementasian nilai akuntabilitas dalam pelaporan keuangan GKJ Nehemia.

1.2. Fokus Penelitian

Sugiyono (2016), dalam bukunya mengatakan bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian ini, fokus masalah yang akan diteliti mengenai bagaimana penerapan akuntabilitas majelis gereja terhadap aktivitas gereja dilihat dari aspek keuangan pada Gereja Kristen Jawa Nehemia Pondok Indah Jakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada ketua majelis, wakil ketua bidang 3 penatalayanan, pendeta gereja, dan beberapa sampling jemaat aktif dan tidak aktif yang bergereja di Gereja Kristen Jawa Nehemia Pondok Indah Jakarta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif melalui pendekatan fenomenologi.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memaknai bagaimana akuntabilitas majelis GKJ Nehemia terhadap aspek keuangan pada organisasi gereja?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana penerapan akuntabilitas majelis gereja terhadap aktivitas gereja dilihat dari aspek keuangan pada Gereja Kristen Jawa Nehemia Pondok Indah.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut yaitu :

1. Bagi gereja, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan gereja sehingga dapat meningkatkan loyalitas jemaat dan meningkatkan partisipasi jemaat melalui keikutsertaan menyumbang ide atau gagasan agar dapat meningkatkan keuangan gereja serta menciptakan program-program gereja yang berkualitas sehingga fungsi gereja sebagai penyambung tangan Tuhan akan optimal.
2. Bagi jemaat, penelitian ini dapat meningkatkan loyalitas jemaat kepada gereja dengan cara ikut berpartisipasi dalam meningkatkan keuangan gereja dan pengelolaan keuangan gereja melalui penciptaan program-program berkualitas.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian bidang akuntansi khususnya membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban mengelola keuangan organisasi nirlaba (akuntansi nirlaba), salah satunya gereja sebagai tempat beribadah umat Kristiani.